

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pelaksanaan Prinsip Bebas Aktif di Bawah Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014). Simpulan ini merujuk pada jawaban atas rumusan masalah penelitian. Bab ini juga memuat rekomendasi untuk kepentingan akademik, terutama sebagai bahan referensi untuk peserta didik pada tingkat SMA/MA sederajat.

5.1 Simpulan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Presiden Indonesia selama dua periode yaitu 2004-2014. Pada masa pemerintahannya Indonesia mengalami kemajuan pesat. Kondisi sosial politik dalam negeri Indonesia bisa dikatakan lebih stabil bila dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya. Konflik di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terselesaikan dengan ditandatanganinya MoU pada agustus 2005 dan ditetapkannya UU No.11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Selain itu konflik di Maluku juga terselesaikan dengan jalan diplomasi aktif kepada para tokoh yang bersangkutan. Kebijakan SBY pada masa pemerintahannya adalah peningkatan anggaran pendidikan menjadi 20 %, mengembangkan penguatan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur untuk mengantisipasi pengaruh negatif dari arus globalisasi, peningkatan profesionalisme lembaga kepolisian dengan cara memperbaiki manajemen informasi, dan penguatan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara menginternalisasi nilai-nilai demokrasi, contohnya pemerintah SBY membebaskan pembentukan partai sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga partai-partai politik tumbuh subur pada masa Pemerintahan SBY.

Pada masa Pemerintahan SBY kondisi sosial politik lingkungan internasional saat itu sedang mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan besar tersebut erat kaitannya dengan menguatnya globalisasi yang membawa dampak besar dalam segala aspek kehidupan manusia terutama dalam perekonomian dunia. Hal tersebut dapat dilihat dari menguatnya kerjasama ekonomi dan perdagangan regional. Kemunculan kekuatan baru, yang biasa disebut sebagai negara industri baru (seperti

empat macan Asia, Meksiko, Brazil di Amerika Latin dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara) dalam bidang ekonomi khususnya, mengindikasikan bahwa lingkungan internasional sedang menuju multipolar, yang artinya selain AS sebagai kekuatan global bermunculan kekuatan-kekuatan global yang baru. Selain munculnya kekuatan baru globalisasi memberikan dampak lain yaitu menguatnya saling ketergantungan antar negara terkait masalah-masalah global dibidang politik, ekonomi, keamanan, sosial, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu meningkatnya peranan aktor-aktor non pemerintah dalam hubungan internasional juga menjadi dampak lain dari menguatnya globalisasi. Meskipun dalam hal ini negara tetap merupakan pelaku utama dalam pelaksanaan hubungan internasional tetapi tidak dapat dipungkiri selain organisasi-organisasi internasional, aktor-aktor baru non pemerintah seperti perusahaan multinasional dan NGOs, dewasa ini telah memainkan peranan penting karena peran ekonominya yang begitu besar dalam kancah pergaulan global.

Dengan kondisi sosial politik dalam negeri yang bisa dikatakan kondusif SBY dapat menjalankan kebijakan luar negeri yang aktif, dalam rangka mencapai tujuan nasional. Untuk menghadapi kondisi sosial politik lingkungan internasional yang penuh dengan gejolak dan perubahan, SBY menetapkan pendekatan konstruktif dalam melaksanakan kebijakan luar negeri. Pendekatan konstruktif adalah kemampuan untuk mengubah musuh menjadi teman, dari teman berubah menjadi mitra kerjasama. Atas dasar pendekatan tersebut teretuslah semboyan *million firends zero enemy*, sebuah semboyan yang mengisyaratkan Indonesia dapat menjalin kerjasama ke semua penjuru tanpa terkecuali. SBY memandang bahwa dalam pelaksanaan politik luar negeri yang harus diutamakan adalah aspek rasional daripada emosional dan menggunakan pendekatan lunak (*soft power*). Selain itu karakteristik lain dari kebijakan luar negeri SBY adalah dalam menjalin kerjasama internasional SBY menitik beratkan pada hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi untuk memajukan ekonomi Indonesia, dan selain itu hal tersebut dimaksudkan untuk menstabilkan kembali ekonomi Indonesia pasca krisis moneter.

Dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Presiden SBY dibantu oleh Menteri Luar Negeri. Menlu SBY pada periode pertama pemerintahannya adalah Hassan Wirajuda (2004-2009) sedangkan pada masa periode kedua Menlu SBY adalah Marty Natalegawa (2009-2014). Pada periode pertama Menlu Hassan Wirajuda memperkenalkan konsep **Widia Wahyuni, 2018**

PELAKSANAAN PRINSIP BEBAS AKTIF DI BAWAH KEPEMIMPINAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (2004-2014)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

diplomasi total, yaitu diplomasi yang berupa negosiasi yang menyangkut banyak aspek dan melibatkan banyak aktor dalam pelaksanaannya tidak hanya aktor pemerintah tetapi juga non pemerintah wajib membantu dalam menyukseskan diplomasi ini. Pada masa pemerintahan SBY salah satu strategi utama pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Indonesia menjadikan ASEAN sebagai prioritas utama sebagai pilar utama untuk membangun komunitas regional dengan memberikan fungsi dan manfaat dari multinasionalisme. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan kedua Menteri Luar Negeri SBY pada dua periode bahwa ASEAN merupakan organisasi yang penting bagi Indonesia.

Upaya kemajuan yang ingin dicapai organisasi tersebut terlihat lebih nyata ketika negara-negara yang termasuk dalam keanggotaan ASEAN membentuk suatu komunitas negara-negara Asia Tenggara, yang dibuktikan dengan ditanda tangannya Deklarasi Cebu di Cebu, Filipina pada tanggal 13 Januari 2007. Pengesahan dari piagam ASEAN yang sekaligus penanda perubahan dari ASEAN sebagai organisasi yang longgar menjadi organisasi yang berdasarkan hukum dan menjadi subjek hukum, menjadi penguat bagi ASEAN untuk berkembang sebagai subjek hukum. Piagam tersebut diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, piagam tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 15 Desember 2008. Ditinjau dari segi perkembangan ekonomi dan politik global, sebenarnya menempatkan ASEAN sebagai pilar utama politik luar negeri Indonesia merupakan langkah yang tepat, karena dari segi ekonomi perkembangan ekonomi ASEAN mampu menggerakkan perekonomian global jauh lebih tinggi dibandingkan perekonomian dunia.

Pemerintah Indonesia juga mampu menempuh kebijakan untuk manajemen hubungan dengan negara *major powers* (India, Jepang, Cina dan Amerika Serikat) melalui ASEAN, yaitu dengan cara melembagakan hubungan antara *major powers* dalam ikatan kerangka dialog lalu mengatur agenda kerjasama dalam kerangka kerjasama regional sehingga dapat mengikat semua kekuatan dalam ikatan kerjasama guna mencegah timbulnya dominasi negara *major powers*. Sedangkan dalam lingkup kerjasama bidang politik dan keamanan, Indonesia adalah inisiator dari ASEAN *Political and Security* yang memfokuskan tujuan pada upaya membangun hubungan damai antar negara dan juga mencegah terjadinya kekerasan didalam negeri dengan

Widia Wahyuni, 2018

**PELAKSANAAN PRINSIP BEBAS AKTIF DI BAWAH KEPEMIMPINAN SUSILO
BAMBANG YUDHOYONO (2004-2014)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

cara memajukan demokrasi dan perlindungan HAM bagi semua masyarakat negara anggota ASEAN.

Sedangkan dalam hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat membentuk kemitraan komprehensif. Kemitraan ini terbentuk ketika Presiden Amerika Serikat di jabat oleh Obama dengan Menlu Hillary Clinton dan Presiden Indonesia SBY dengan Menlu Marty Natalegawa. Jika pada pemerintahan sebelumnya Indonesia-AS membentuk kerjasama terutama dalam bidang perekonomian dan militer maka pada periode kedua pemerintahan SBY, Indonesia-AS membentuk kemitraan komprehensif RI-AS. Kemitraan tersebut ditandatangani secara resmi pada bulan November 2010 ketika Presiden Obama melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Terdapat empat bidang kerjasama yang menjadi prioritas dalam kemitraan komprehensif Indonesia-AS yaitu bidang politik dan keamanan, ekonomi dan pembangunan, sosial-budaya, pendidikan (ilmu pengetahuan dan teknologi). Kesepakatan kemitraan komprehensif Indonesia-AS ditandatangani langsung oleh kedua menteri luar negeri kedua negara yaitu Marty Natalegawa dan Hillary Clinton.

Selain itu disepakati pula pembentukan enam pokja Indonesia-AS di bawah payung RI-US *Joint Commission Meeting* (JCM). Enam bidang kerjasama tersebut adalah *democracy and civil society, education, climate and enviroant, defense, trade and investment, and energy*. Secara politis kemitraan komprehensif tersebut dapat membantu penguatan kapasitas institusi-institusi demokrasi di Indonesia. Sedangkan dari perspektif ekonomi, kemitraan komprehensif tersebut meningkatkan aktifitas kedua negara seperti perdagangan dan investasi sekaligus dukungan dan bantuan untuk menguatkan fondasi ekonomi Indonesia khususnya dalam hal pendidikan, kesehatan, infastruktur, manufaktur dan teknologi.

Pelaksanaan prinsip bebas aktif pada masa kepemimpinan SBY berdampak positif bagi citra Indonesia khususnya dalam pergaulan internasional. Citra positif yang berkembang di internasional berkontribusi dalam meningkatkan popularitas Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dengan seringnya Indonesia dijadikan sebagai tuan rumah dalam forum internasional, terjalannya kemitraan strategis antara Indonesia dengan negara-negara maju atau berkembang, juga terjalannya kemitraan strategis dan komprehensif dengan negara *Major Powers*. Baiknya citra Indonesia di luar negeri membawa pengaruh positif bagi

Widia Wahyuni, 2018

PELAKSANAAN PRINSIP BEBAS AKTIF DI BAWAH KEPEMIMPINAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (2004-2014)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

perkembangan dalam negeri Indonesia khususnya terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa rekomendasi diantaranya:

Pertama, politik luar negeri bebas aktif merupakan kajian yang sangat kompleks dan luas, sehingga kajian mengenai politik luar negeri ini masih perlu digali lagi secara lebih mendalam. Kepada peneliti selanjutnya, kondisi tersebut tampaknya dapat dimanfaatkan sebagai celah penelitian untuk mengkaji lebih dalam tentang politik bebas aktif. Misalnya peneliti selanjutnya dapat memfokuskan penelitiannya pada perbandingan kebijakan luar negeri masa Menlu Hassan Wirajuda dengan Menlu Marty Natalegawa. Lalu bisa juga meneliti mengenai politik luar negeri bebas aktif yang ditinjau dari keikutsertaan Indonesia dalam organisasi-organisasi internasional atau masalah-masalah internasional yang lebih spesifik berdasarkan skripsi ini.

Terdapat beberapa kekurangan dalam skripsi ini, diantaranya dalam mengetahui latarbelakang Menlu masa pemerintahan SBY, penulis hanya menuliskan biografi kedua Menlu tersebut berdasarkan referensi yang berdasarkan atas berita online, majalah maupun jurnal. Karena terkait sumber penulis kesulitan menemukan buku referensi yang memuat biografi kedua Menlu tersebut. Bagi peneliti selanjutnya mungkin bisa melakukan wawancara langsung terhadap tokoh-tokoh tersebut sehingga lebih memahami tokoh yang diteliti.

Kedua, bagi para pengguna atau pembaca hasil penelitian ini, khususnya bagi yang tertarik dalam bidang sejarah dan politik luar negeri. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan khususnya bagi sejarah Nasional Indonesia terkait materi politik luar negeri masa Reformasi. Skripsi ini juga dapat dijadikan sumber rujukan bagi siswa SMA yang mempelajari Sejarah Indonesia masa Reformasi. Namun perlu diketahui bahwa dalam memahami isi dari skripsi ini, siswa membutuhkan bimbingan guru agar tidak salah dalam memahami bahasan pelaksanaan prinsip bebas aktif pada masa SBY. Perbedaan pandangan dan penafsiran dalam skripsi ini dengan kajian politik yang lain dapat dimaknai sebagai keanekaragaman sudut pandang dalam penulisan sejarah. selain itu, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi mutakhir bagi sejarah Indonesia dalam bidang keilmuan sejarah dan juga politik luar negeri Indonesia. Semoga hasil

Widia Wahyuni, 2018

**PELAKSANAAN PRINSIP BEBAS AKTIF DI BAWAH KEPEMIMPINAN SUSILO
BAMBANG YUDHOYONO (2004-2014)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penelitian ini dapat memberikan inspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Ketiga, bagi lembaga atau Departemen Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia skripsi ini dapat dimaksudkan untuk menambah khazanah penulisan karya ilmiah selain itu skripsi ini juga merupakan pendokumentasian peristiwa sejarah Indonesia yang berkenaan dengan politik luar negeri Indonesia pada masa SBY.